

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dorongan dan aspirasi dari berbagai institusi keagamaan maupun kelompok semakin menguat dalam pergerakannya. Berkaitan dengan radikalisme, gerakan ini bukan merupakan sebuah aksi yang muncul dari ruang vakum, melainkan ia memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor penyebab dan pendorong munculnya gerakan perubahan disertai kekerasan tersebut. Pada umumnya, radikalisme muncul dari pemahaman agama yang tertutup dan dimaknai secara sempit yang merujuk pada pandangan yang bersifat tekstual. Namun khususnya, masalah yang berkaitan dengan munculnya gerakan radikalisme berasal dari faktor kesenjangan sosial yakni persoalan kemiskinan dan kesejahteraan, kebijakan yang tidak adil karena adanya eksploitasi sumber daya oleh para elit penguasa, menimbulkan naiknya angka pengangguran dan makin tingginya biaya hidup, yang belum sepenuhnya diselesaikan di masa reformasi. Problem ketidakadilan sosial berupa kemiskinan kerap dijadikan alasan tersendiri bagi golongan tertentu untuk melakukan aksinya, kemiskinan atau kesengsaraan dapat menjadi faktor pencetus bagi seseorang untuk melakukan tindakan apapun. Berdasarkan hal tersebut dijadikan dalih bahwa negara dengan konsep Pancasila telah gagal dalam merumuskan kesejahteraan sosial terutama setelah era reformasi yang disebut dengan istilah “Krisis Multi Dimensi”. Maka obsesi golongan semakin kuat untuk yakin dan berusaha merubah tatanan negara

dengan konsep syariah murni yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Secara historis, hasil penelitian awal berdasarkan survey nasional yang dilakukan Lazuardi Birru menunjukkan bahwa sejumlah pesantren di Jawa Barat berpotensi menjadi basis awal tumbuhnya gerakan yang melahirkan kekerasan, menjadikan pesantren sebagai salah satu basis penanaman ideologi politik mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan citra Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki karakter Islam yang damai.

Pihak yang berwenang dalam hal ini BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terosisme) menyebutkan pihaknya terus memaksimalkan penyebaran melawan radikalisme dengan konsep kemandirian atau pemberdayaan ekonomi pada setiap institusi agama. Disinilah peran dan fungsi institusi agama yang berperan untuk menanggulangnya. Salah satunya adalah pesantren yang memiliki fungsi strategis untuk turut serta mencegahnya karena pesantren merupakan tempat transfer nilai-nilai keagamaan.

Tentunya pada hal ini pondok pesantren diharapkan sebagai titik awal dalam pencegahan tindakan radikalisme. Namun peran pesantren dalam penanggulangan radikalisme tidak cukup hanya dalam hal aspek pendidikan saja, tapi harus ditopang dengan faktor-faktor lain seperti dalam hal ekonomi, karena ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adanya tindakan radikalisme, dengan kebutuhan yang serba kekurangan akan mendorong manusia untuk keluar dari situasi tersebut, kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan kemanusiaan. Tentunya

kombinasi antara Pendidikan Agama dengan Ekonomi menjadi suatu hal yang amat penting dan inilah yang belum diterapkan dalam sebagian besar pesantren di Indonesia khususnya di daerah Jawa Barat.

Pondok Pesantren Tarekat Al-Idrisiyah telah lebih dulu menjalankan konsep bukan hanya dari segi pendidikan formal saja, melainkan dengan menerapkan Divisi Ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Ketuhanan sesuai dengan Pancasila sila pertama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah berdasarkan ijtihad para Fuqoha. Pondasi utama dalam menjalankan prinsip ekonomi ini berdasar pada 3 hal pokok sebagai nilai dan norma dasar yang harus diterapkan yaitu:

1. Nilai-nilai Iman (Tauhid).
2. Nilai-nilai Islam (Syariah).
3. Nilai-nilai Ihsan (Tasawuf).

Bentuk dari berbagai kegiatan ekonomi yang telah dikembangkan diantaranya: BMT (Baitul Maal wat Tamwil), Mini Market, Pembentukan Koperasi, Perikanan, Restoran, Perkebunan, Tambak Udang, Warung UKM, dan Travel Umroh, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat.

Tentunya yang perlu digaris bawahi disini ialah bentuk kegiatan perekonomian tersebut tidak menyebabkan matinya perekonomian masyarakat sekitarnya, justru hal itu menjadikan terciptanya lapangan pekerjaan yang luas. Para santri dilibatkan untuk ikut serta berpartisipasi mengelola dan

mengembangkan kegiatan perekonomian tersebut sebagai pembinaan untuk menumbuhkan jiwa sosial preneur.

Berdasarkan konsep tersebut, menarik untuk dijadikan bahan penelitian yang berjudul “Strategi Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren dalam Penanggulangan Radikalisme (Studi Analisis Keberadaan Divisi Ekonomi Pondok Pesantren Tarekat Al-Idrisiyah Tasikmalaya) yang diharapkan pencapaian kesejahteraan mulai tumbuh sehingga tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama atau hukum, juga perbuatan yang menyimpang dalam hal ini yaitu radikalisme dapat ditekan dan ditanggulangi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana metode/cara yang dilakukan untuk membangun divisi ekonomi Ponpes Tarekat Al-Idrisiyah dalam penanggulangan Radikalisme?
2. Apa manfaat yang diperoleh masyarakat mengenai adanya divisi ekonomi tersebut?
3. Bagaimana pola yang dilakukan untuk mempertahankan divisi ekonomi Ponpes Tarekat Al-Idrisiyah dalam penanggulangan radikalisme?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang akan dicapai diantaranya adalah:

1. Menjelaskan metode/cara yang dilakukan untuk membangun divisi ekonomi Ponpes Tarekat Al-Idrisiyah dalam penanggulangan Radikalisme.
2. Mendeskripsikan manfaat yang diperoleh masyarakat mengenai adanya divisi ekonomi tersebut.
3. Memahami pola yang dilakukan untuk mempertahankan divisi ekonomi Ponpes Tarekat Al-Idrisiyah dalam penanggulangan radikalisme.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, kegunaan dari penelitian ini baik dalam hal teoritis (akademis) maupun praktis diantaranya yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan kajian ilmiah mengenai “Strategi Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren dalam Penanggulangan Radikalisme (Studi Analisis Keberadaan Divisi Ekonomi Pondok Pesantren Tarekat Al-Idrisiyah Tasikmalaya)” bagi para mahasiswa studi agama-agama, umunya bagi seluruh mahasiswa, serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam mata kuliah sosiologi agama. Kemudian dalam hal ini pula dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan informasi bagi semua khalayak masyarakat terkhusus di wilayah Kecamatan Cisayong-Tasikmalaya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu masukan dan prototipe bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, dan terkhusus mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Studi Agama-agama yang membaca skripsi ini terutama dalam hal peran Pondok Pesantren dalam penanggulangan tindakan radikalisme. Demikian pula bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai pembuat kebijakan untuk memiliki atau membuat sebuah terobosan dalam Undang-undang.

E. Kerangka Pemikiran

Pondok Pesantren Al-Idrisiyah sebagai institusi pemahaman keagamaan kepada umat untuk mencapai penerapan konsep Islam yang *Rahmatan lil 'alamin* justru berperan juga dalam menanggulangi sikap maupun tindakan yang bertentangan dengan norma agama dalam hal ini yaitu Radikalisme. Ajaran Islam yang komprehensif menekankan untuk bukan hanya menjalankan agama pada arah ritual semata, namun juga harus dijalankan pada segi aspek sosial yang disebut muamalah. Berdasarkan hal tersebut, konsep kemandirian ekonomi pondok pesantren merupakan kegiatan yang sangat vital untuk diberdayakan guna tercapainya kesejahteraan dan pencegahan pemahaman tindakan kekerasan tersebut.

Penulis mengutip pemikiran dari M. Dawam Rahardjo yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam bisa menjadi kekuatan alternatif jika ia mendasarkan gerakannya pada nilai-nilai kewargaan. Konsekuensinya adalah

bahwa sistem ekonomi islam harus terlebih dahulu menjadi gerakan spiritual dan gerakan kultural, hal itu harus menjadi dasar pijakannya yang dimulai dengan menanamkan nilai-nilai etis secara luas, tidak saja dikalangan terpelajar, tetapi juga dikalangan anggota masyarakat luas.¹ Kehidupan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari ajaran-ajaran agama, dalam praktiknya kolaborasi antara pemikiran ekonomi dan ajaran Islam menghasilkan suatu sistem ekonomi yang disebut sistem ekonomi Islam yang berisikan asas-asas dan kaidah-kaidah Islam perihal masalah ekonomi. Sistem ekonomi yang digali dari visi Islam tidak mengizinkan adanya pemisahan nilai-nilai moral dari alokasi dan distribusi sumber daya. Strategi untuk merealisasikan kebahagiaan ruhani dan kemakmuran materi seharusnya tidak bersandar pada negara atau pasar, tetapi disandarkan pada sejumlah mekanisme yang harus disusun dan diturunkan dari fondasi moral Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka poin penting dalam hal ini adalah reformasi individu muslim dalam kehidupan moral dan spiritual.²

Tentunya pernyataan tersebut harus dibarengi dengan peran yang sistematis untuk menekan tindakan radikalisme. Peran dalam berorganisasi dalam komunitas masyarakat yang mempunyai kedudukan sebagai sesuatu yang berfungsi bagi khalayak masyarakat menjadi salah satu bagian penting sebagai *problem solver* dalam berbagai peristiwa.³

¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2015), 17.

² Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, 14.

³ M. Yusuf B.A, *Peran Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu dalam penyediaan tenaga kerja*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 1, 2016, 429.

Berdasarkan teori Fungsionalisme Struktural, peran merupakan konsep dinamis dari suatu kedudukan artinya ada amanat yang harus ditegakkan dalam memenuhi tanggung jawab sosial di masyarakat berdasar pada status sosial yang diembannya. Penulis mengutip dari pemikiran Talcott Parsons yang menyatakan bahwa Masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem yang terintegrasi dan saling terhubung berdasarkan kesepakatan dari berbagai anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan yang bertujuan mengatasi segala perbedaan-perbedaan. Kemudian dari hal tersebut masyarakat dipandang sebagai sistem yang secara fungsi saling terintegrasi dan berkesinambungan dalam suatu keseimbangan.

Masyarakat dan institusi sebagai suatu sistem memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menyeimbangkan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Artinya kestabilan tidak akan terwujud jika suatu masyarakat tidak berada pada jalur sesuai kebutuhannya, maka atas dasar itulah suatu sistem dengan seluruh bagiannya harus saling mempengaruhi dan bekerjasama untuk mencapai kondisi yang stabil.

Pondok Pesantren Tarekat Al-Idrisiyah Tasikmalaya telah membentuk divisi ekonomi yang berperan dalam kegiatan perekonomian dengan berbagai usaha tertentu guna membangun karakter santri berjiwa sosial preneur dan berperan menciptakan lingkungan masyarakat yang makmur yang kemudian diharapkan bisa mencapai titik kesejahteraan dan kestabilan ekonomi terutama dalam penanggulangan tindakan radikalisme.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Demi kesempurnaan penelitian ini, selain data yang penulis dapat dari hasil observasi dilapangan, penelitian ini ditambahkan dengan studi kepustakaan. Kajian pustaka yang akan dilakukan meliputi hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji meliputi skripsi, jurnal dan buku. Sebagaimana contoh adalah:

1. Skripsi “Peranan Guru PAI dalam Upaya Menangkal Radikalisme pada Peserta Didik SMAN 9 Yogyakarta” Karya Mochamad Mufid pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran guru dalam menekan tindakan radikalisme dengan pola pengajaran yang tekstual, mengajarkan toleransi dan cinta perdamaian.
2. Artikel “Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas” Karya Ahmad Asrori, diterbitkan pada jurnal Kalam, Vol. 9, No. 2, 2015, halaman 253-268. menjelaskan bahwa salah satu faktor radikalisme adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme. Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarginalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Sedangkan cara tepat di dalam antropisitas radikalisme di Indonesia adalah melalui jalur Peran Pemerintah; Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan; Peran Masyarakat Sipil; Beberapa Isu

Kritis; Peran Deradikalisasi; Rehabilitasi dan Reintegrasi; dan Pendekatan Kesejahteraan.

3. Artikel “Peran Pesantren Dalam Mencegah Fundamentalisme-Radikalisme Agama (Studi Kualitatif Di Pesantren Nurul Ummah Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)” yang ditulis oleh Puji Laksono dari Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto, diterbitkan pada jurnal asketik, Vol. 1, No. 2, pada tahun 2017, halaman 91-100, mengemukakan bahwa Mengingat masyarakat global saat ini telah terintegrasi dalam pasar bebas, seperti AFTA (Asean Free Trade Area). Menjadikan interaksi sosial sudah bersifat heterogen. Maka pandangan sempit, sikap egoistik beragama yang cenderung merasa diri paling benar harus dicegah. Hal ini untuk menciptakan hubungan sosial masyarakat global yang hidup berdampingan dalam perbedaan secara damai.